

BAB III

SIGNIFIKANSI TRILATERALISME DAN ALIANSI MILITER

Dalam bab ini akan dibahas mengenai rancangan trilateralisme yang pada awalnya diusung oleh Amerika Serikat (AS) untuk membawa perdamaian di wilayah Asia Timur. Dikarenakan Asia Timur merupakan wilayah yang paling dinamis dengan tensi yang sangat fluktuatif. Trilateralisme ini terbagi dalam berbagai macam aspek seperti ekonomi politik serta militer. Namun dalam bab ini akan lebih difokuskan pada sisi trilateralisme militer yang disebut sebagai *Trilateral Military Alliance (TMA)*. Selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh Korea Selatan apabila tergabung dalam aliansi militer ini.

A. Rancangan Trilateralisme

Dalam hubungan internasional, hubungan trilateral meliputi mereka yang memiliki kesamaan tujuan politik dan visi strategis mengenai tatanan regional maupun internasional. Sehingga kerjasama ini tidak melulu hanya meliputi kerjasama formal antar negara. Selain itu, konfigurasi unik dari pengelompokan trilateral, yang terletak di antara hubungan bilateral dan pengaturan multi-mitra yang lebih luas, menjadikannya bentuk paling minimal dari multilateralisme atau bisa disebut dengan minilateralisme. Khususnya di suatu wilayah yang ditandai oleh tidak adanya arsitektur keamanan regional yang menyeluruh, kerja sama trilateral yang digerakkan oleh misi *ad hoc*, telah lama memainkan peran nyata dalam diplomasi internasional. (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 4).

Asia Timur merupakan wilayah yang sangat dinamis, para pengamat memperkirakan hal ini akan terus terjadi hingga beberapa tahun mendatang. Kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), restrukturisasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang serta tensi yang berkelanjutan di semenanjung Korea,

hal-hal tersebut berkontribusi besar dalam suasana ketidakpastian di wilayah tersebut. Di RRT pertumbuhan ekonomi dan integrasi secara internasional ditingkatkan dengan akses ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan modernisasi militer yang mengarah pada pertanyaan mengenai masa depan negara *super power* terutama di wilayah Asia Timur. Bagi Jepang, stagnasi ekonomi yang terjadi selama satu dekade menimbulkan pertanyaan mengenai perannya sebagai mesin pertumbuhan dan perkembangan regional (Center For Strategic and International Studies, 2002, hal. 3).

Hubungan Korea Selatan dan Jepang tidak cukup baik akibat Perang Dunia II yang menambah fluktuasi di wilayah Asia Timur. Kedua negara ini memulai kembali interaksi diplomatik resmi mereka pada tahun 1965. Ada beberapa upaya untuk menormalkan hubungan mereka sebelumnya, tetapi butuh dua dekade setelah pembebasan Korea Selatan dari pemerintah kolonial Jepang bagi kedua pemerintahan untuk menandatangani perjanjian normalisasi. Sejak itu, bagaimanapun, hubungan bilateral secara keseluruhan antara dua negara telah dan terus meningkat dengan cepat sampai akhir Perang Dingin (Kim, 2017, hal. 3).

Di semenanjung Korea, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan terus ditandai oleh permusuhan dan pertempuran militer periodik, meskipun perkembangan yang penuh harapan terjadi sesekali seperti KTT Utara-Selatan tahun 2000 dan reuni keluarga secara periodik. Perekonomian Korea Utara tetap berantakan, bahkan ketika rezim terus menuangkan sumber daya ke dalam militernya. Rezim berkembang dan sering mengekspor untuk teknologi dan kemampuan *hardcurrency* yang menabur ketidakstabilan internasional, seperti misil balistik, tank, dan perangkat keras militer lainnya. Komunitas internasional sangat prihatin dengan perkembangan senjata pemusnah massal oleh Korea Utara khususnya setelah 11 September, khawatir akan potensi ekspor mereka ke negara-negara dengan gerakan teroris. Pada saat yang sama, bahkan ketika komunitas internasional berusaha mengekang rezim

Pyongyang, hanya sedikit yang ingin melihat keruntuhan rezim tersebut yang cepat, yang dapat menyebabkan gerakan pengungsi besar-besaran di wilayah tersebut dan dapat menempatkan beban yang luar biasa pada sumber daya regional (Center For Strategic and International Studies, 2002, hal. 3).

Amerika Serikat telah menanggapi tantangan di atas dengan secara mendasar menegaskan kembali strategi keamanan Asia Timur dari aliansi bilateral dan militer, sebuah strategi yang telah menjaga stabilitas regional dan mempromosikan perkembangan politik dan ekonomi yang damai selama setengah abad. Meskipun ada keberhasilan nyata dari pendekatan ini, bagaimanapun, pada akhir 1990-an, Amerika Serikat mengakui bahwa inisiatif kreatif yang dihasilkan dalam struktur ini dapat lebih memperkuat keamanan bersama dan mempromosikan kepentingannya di wilayah tersebut.

Di antara inisiatif tersebut adalah upaya untuk mengoordinasikan kebijakan AS tentang Korea Utara dengan dua sekutu Asia Timur Laut Amerika Serikat, dan memulai proses trilateral yang dapat diterapkan pada kepentingan keamanan regional lainnya dari waktu ke waktu. Ide ini memunculkan harapan untuk terbentuknya “aliansi virtual” antara AS, Korea Selatan dan Jepang. Dalam prosesnya, AS mengharapkan agar Korea Selatan dan Jepang dapat melupakan kenangan pahit di masa lalu dan mengembangkan kerjasama strategis (Center For Strategic and International Studies, 2002, hal. 3).

Trilateralisme ini telah dilaksanakan secara tetapi belum terintegrasi dan terlembagakan. Misalnya, segera setelah Korea Utara mengumumkan niatnya untuk mundur dari *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* pada tahun 1993, AS, Korea Selatan, dan Jepang bertindak cepat dengan mengadakan pertemuan antara ketiga negara di New York. Di antara langkah-langkah lain, mereka memilih trilateralisme sebagai mekanisme yang layak untuk mengelola krisis nuklir Korea Utara (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 4).

Dengan berakhirnya Perang Dingin, konfrontasi antara hubungan trilateral antar AS, Korea Selatan dan Jepang melonggar untuk sementara waktu, khususnya di bidang keamanan. Tetapi ketika isu pengembangan nuklir Korea Utara kembali muncul, hal ini kembali meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut sekitar awal tahun 1990-an. Kerjasama keamanan trilateral diperkuat lagi dan menjadi lebih dilembagakan sebagai *Defense Trilateral Talks (DTT)* pada tahun 1994. Pertemuan ini diadakan di tingkat wakil menteri dan berlangsung hingga tahun 2002. Selain itu, pertemuan tingkat wakil menteri lainnya dari *Trilateral Coordination and Oversight Group (TCOG)* juga telah dibentuk di tingkat Kementerian Luar Negeri pada tahun 1999 untuk mengatasi ancaman yang meningkat dari pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara. TCOG terus bersidang hingga 2004 dan kemudian, akhirnya diganti oleh *Six Party Talks* meliputi AS, Korea Selatan, Jepang, Korea Utara, Federasi Rusia dan RRT (Kim, 2017, hal. 3). *Six Party Talks* telah berjalan hingga putaran ke-6 di tahun 2009 dan perkembangannya terhambat sejak saat itu dikarenakan Korea Utara menarik diri dari perkumpulan tersebut dan menyatakan untuk tidak ingin terikat lagi dengan segala perjanjian yang ada. Perkembangan terbaru muncul di tahun 2017 ketika salah satu perwakilan khusus Korea Utara menyampaikan kepada Rusia bahwa mereka siap untuk melanjutkan kembali *Six Party Talks*. Namun, hanya ada sedikit kemajuan menuju melanjutkan forum enam negara tersebut baru-baru ini (Liang, 2018).

Meskipun telah terbentuk *Six Party Talks*, pertemuan trilateral antar AS, Korea Selatan dan Jepang juga terus berjalan. Kerja sama trilateral yang dekat pada awal tahun 2000an menjadi suram selama Administrasi Roh Moo Hyun dan Kabinet Koizumi terutama karena sejarah dan isu-isu teritorial yang sangat sensitif. Setelah periode pencairan yang singkat, selama tahun-tahun awal Pemerintahan Lee Myung Bak, hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang kembali memburuk dan tetap membeku sampai tahun 2015 ketika Administrasi Taman Geun-hye dan Kabinet Abe akhirnya

berhasil mencapai kesepakatan tentang salah satu yang paling sulit masalah antara dua pemerintah, yaitu, masalah *comfort women*.

Meskipun kesulitan dalam mempertahankan hubungan diplomatik biasa, baik kerjasama bilateral (Korea Selatan-Jepang) dan trilateral (Korea Selatan-AS-Jepang) di bidang keamanan terus berkelanjutan. Misalnya DTT yang dimulai kembali pada tahun 2008 terus diadakan hingga saat ini. Pertemuan para menteri pertahanan trilateral dalam Dialog Shangri-la di Singapura juga telah diadakan setiap tahun sejak 2009 hingga tahun ini (Kim, 2017, hal. 4).

Karena kegagalan untuk menandatangani *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)* pada tahun 2010, kerja sama bilateral antara Korea Selatan dan Jepang dalam bidang keamanan mengalami kesulitan sekali lagi, tetapi untungnya dihidupkan kembali ke saluran normal ketika keduanya menyetujui *Trilateral Information Sharing Agreement (TISA)*.

Karena ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara terus meningkat dengan cepat, pemerintah Korea Selatan dan Jepang akhirnya menandatangani GSOMIA pada tahun 2016 dan mendapatkan kembali momentum untuk memperkuat kerja sama keamanan bilateral mereka. Hal ini dilakukan terutama untuk menghalangi dan membela terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Selain itu, tidak seperti kekhawatiran tentang desas-desus administrasi Moon Jae In mengenai sikap yang lebih nasionalistik terhadap Jepang, Presiden Moon justru menyelesaikan dengan sukses pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Abe dan setuju untuk mengejar kebijakan dua jalur yang memisahkan isu keamanan dari isu-isu sejarah selama Konferensi G20 pada bulan Juli 2017 di Berlin. Oleh karena itu, hubungan bilateral dan trilateral pada masa awal kepemimpinan Moon Jae In dapat dikatakan tidak baik atau sangat buruk, tetapi secara berkelanjutan mempertahankan

tingkat kerjasama yang diperlukan secara bertahap (Kim, 2017, hal. 4).

Kerjasama keamanan trilateral yang sedang berlangsung antara Korea Selatan, AS dan Jepang dapat diringkas menjadi lima kelompok. Pertama, ada beberapa saluran reguler pembicaraan kebijakan tingkat tinggi. Seperti disebutkan di atas, mereka termasuk Pertemuan Menteri Pertahanan di Shangri-la, *Defense Trilateral Talks (DTT)*, pertemuan Trilateral di antara Ketua Kepala Staf Gabungan, dan seterusnya. Kedua, angkatan bersenjata yang relevan dari tiga negara berpartisipasi bersama dalam latihan gabungan dan *multilateral combined exercises* dan pelatihan di bidang pencarian dan penyelamatan, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, anti-pembajakan, deteksi rudal, operasi anti-kapal selam, *Blue Lightning*, dan lain-lain. Ketiga, koordinasi kebijakan dan konsultasi tentang ancaman nuklir Korea Utara jelas merupakan suatu bidang kerja sama trilateral yang erat akhir-akhir ini. Keempat, tiga negara lebih berupaya berbagi informasi dan diseminasi melalui GSOMIA dan dengan menghubungkan ke jaringan seperti APIIN (*Application Program Interface*). Kelima, ada program pertukaran pendidikan lainnya dalam skala yang lebih kecil untuk latihan meja pertahanan rudal, operasi pemeliharaan perdamaian, dan sebagainya (Kim, 2017, hal. 4).

Sejauh ini trilateralisme antara Korea Selatan, AS dan Jepang sejauh ini hanya dilakukan dalam bentuk kerjasama, forum-forum serta beberapa perjanjian. AS bermaksud untuk membuat kerjasama ini lebih terintegrasi menjadi sebuah aliansi yang terpusat dan terlembagakan. Hal seperti ini pernah terjadi selama pembentukan Uni Eropa dimana banyak perjanjian dan kerjasama yang terbentuk. Tetapi hal ini justru memberikan beban bagi negara-negara pengikut karena dalam perjanjian maupun kerjasama dibutuhkan sumber daya manusia dan juga memakan biaya.

B. Signifikansi Aliansi Militer

Dr. Sangit Sarita mengutip pendapat dari Arnold Wolfer mendefinisikan aliansi sebagai janji bantuan militer bersama antara dua atau lebih negara yang berdaulat. Aliansi memainkan peran sentral dalam hubungan internasional karena mereka dipandang sebagai bagian integral dari kenegaraan. Aliansi terbentuk antara dua atau lebih negara untuk melawan musuh bersama. Mereka telah menjadi fokus penelitian penting dalam teori hubungan internasional. Hal ini dapat dimengerti karena salah satu perdebatan dalam kebijakan luar negeri di setiap negara yang berpusat pada masalah negara yang bersekutu dengan dan untuk berapa lama. Negara yang kuat dan lemah sama-sama merasa perlu membentuk aliansi. Negara-negara lemah masuk ke dalam aliansi ketika mereka membutuhkan perlindungan terhadap negara-negara yang kuat, mereka masuk ke dalam aliansi untuk membela diri. Negara-negara kuat masuk ke dalam aliansi untuk melawan negara-negara kuat lainnya. Negara mengharapkan sekutunya untuk membantu secara militer dan diplomatik selama masa konflik (Dwivedi, 2012, hal. 1-2).

Manfaat utama dari aliansi jelas adalah keamanan, tetapi banyak manfaat non-keamanan juga bisa didapatkan dari aliansi. Manfaat keamanan dalam aliansi pertahanan bersama termasuk kemungkinan yang lebih rendah untuk diserang (*deterrence*), memiliki kekuatan yang lebih besar dalam hal serangan (pertahanan) dan pencegahan terbentuknya aliansi antara sekutu dengan musuh seseorang (*preclusion*). Aliansi memberikan peningkatan substansial dengan cepat. Meningkatkan kemampuan militer sendiri akan memakan waktu yang cukup lama, sementara aliansi menjadi pilihan yang dapat diandalkan (Chun, 2000, hal. 76).

Sejak Korea diintegrasikan ke dalam sistem negara modern pada akhir 1870-an, alternatif pembangunan kekuatan militer secara mandiri tidak begitu mengesankan. Tanpa komitmen sekutu pada akhir abad ke-19, Korea menjadi koloni Jepang.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Korea mencoba untuk memiliki pertahanan independen. Namun Korea Selatan dihadapkan pada Perang Korea hanya setelah ditariknya pasukan AS yang selesai pada 1949. Pengalaman sejarah atas ketidakamanan nasional ketika tidak memiliki sekutu mendorong Korea Selatan untuk segera mencari mitra aliansi, yang dicapai oleh *Mutual Defense Treaty* antara Korea Selatan dan AS pada tahun 1953 (Chun, 2000, hal. 73).

Trilateralisme antara AS, Korea Selatan, dan Jepang merupakan pendekatan yang diperlukan dan efektif untuk mengatasi banyak tantangan tradisional dan non-tradisional di dalam dan di luar Asia. Inisiatif-inisiatif trilateral paling berhasil ketika mereka didasarkan pada perlawanan terhadap ancaman bersama dan mempromosikan kepentingan bersama yang konkret, daripada dilakukan hanya demi tiga negara melakukan sesuatu bersama (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 2).

Meskipun kajian mengenai Asia Timur memiliki tempat khusus di hati para peneliti, tetapi ketertarikan dan perhatian atas trilateralisme di wilayah ini masih belum sama besarnya seperti aliansi maupun pengelompokan negara di wilayah lain. Beberapa menyebutkan bahwa regionalisme yang terjadi di Asia Timur itu “tidak biasa”, karena hal ini ditentukan oleh ketidakhadirannya institusi keamanan regional yang formal (Calder & Francis, 2008). Ketiadaan ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di wilayah Eropa, dimana negara-negara disana berupaya untuk membangun organisasi yang kuat seperti *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*. Hal ini dapat dikaitkan sebagai akibat dari pengaruh kolonialisme dan perbedaan yang mencolok dalam identitas nasional dan sistem politik. Namun beberapa tahun terakhir, Asia telah mengalami proliferasi pengelompokan trilateral. Trilateralisme, yang tidak masuk ke dalam kerangka kerja aliansi tradisional bilateral maupun multilateral, semakin banyak dilakukan di Asia sebagai mekanisme alternatif kerja sama antarnegara.

Nilai intrinsik dari hubungan trilateral sebagai bentuk sah kerja sama regional yang memberikan manfaat kepada semua pihak yang berpartisipasi. Menurut pandangan ini, trilateralisme adalah bentuk multilateral yang paling diminimalisir dan karenanya mewarisi beberapa keuntungan dasar multilateralisme tradisional sambil menghindari masalah-masalah yang paling serius. Muhui Zhang berpendapat bahwa karena jumlah mitra koperasi yang relatif kecil, minilateralisme dikenal luas karena efisiensi, mengingat bahwa komplikasi dan biaya transaksi diharapkan sebanding dengan jumlah aktor yang terlibat dalam pengaturan multilateral. Bukan merupakan hal yang aneh bagi negara-negara anggota dengan kepentingan yang sangat berbeda memutuskan untuk menghentikan kerjasama multilateral dengan alasan tingginya beban birokrasi dan biaya administrasi (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 5).

Trilateralisme juga menawarkan banyak manfaat yang sama dengan multilateralisme tradisional. Di tempat pertama, memastikan aliran komunikasi yang stabil dan efektif dengan melembagakan titik kontak untuk mitra. Kerjasama trilateral juga memfasilitasi perencanaan kebijakan jangka panjang dan memupuk pembangunan institusi di antara negara-negara yang terlibat. Dalam proses ini, para pihak dapat memetik manfaat dari norma-norma bersama dan koordinasi yang lebih erat di bidang isu yang luas.

Pembahasan mengenai manfaat aliansi tiga negara ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek termasuk ekonomi, militer dan politik. Penjabaran di atas mampu memberikan jawaban untuk ketiga aspek tersebut. Namun berdasarkan pada pembahasan di skripsi ini, akan dijabarkan juga keuntungan dan alasan mengapa negara perlu bergabung dan membentuk *formal military alliance*.

Manfaat yang dirasakan dari bergabung dengan aliansi militer formal adalah keyakinan bahwa karena bentuk pertahanan kolektif semacam itu meningkatkan keamanan

dengan menyediakan komitmen formal militer dan elemen-elemen kekuatan nasional lainnya di antara para signatoris, aliansi tersebut menghalangi tindakan musuh-musuh potensial (Cook J. , 2013, hal. 561). Dalam kasus AS, Korea Selatan dan Jepang, musuh potensial yang dimaksud adalah Korea Utara. Semakin meningkatnya aktifitas uji coba nuklir oleh Pyongyang menjadi ancaman bagi kestabilan dan keamanan wilayah Asia Timur.

Ada juga dimensi simbolis untuk aliansi formal, yang secara ringkas ditangkap oleh mantan Menteri Luar Negeri Madeline Albright ketika dia menyatakan bahwa NATO adalah ekspresi dari hubungan transatlantik yang sangat diperlukan. Advokat aliansi percaya bahwa perjanjian resmi ini mempromosikan perdamaian dan menghindari perang dengan menawarkan contoh NATO, yang mereka anggap berperan dalam menghalangi Uni Soviet dan "memenangkan" Perang Dingin. Meskipun kritikus berpendapat bahwa NATO saat ini sedikit lebih dari peninggalan usang dari era masa lalu dan hanyalah "aliansi mencari misi" setelah runtuhnya Uni Soviet, kenyataannya tetap bahwa tantangan tradisional negara-versus-negara masih ada dan penangkalan tetap menjadi bagian penting dari "toolbox" keamanan nasional manapun. Jadi aliansi militer formal dapat membantu mencegah perang.

Misalnya, dapat dikatakan bahwa aliansi militer AS dengan Korea Selatan telah membantu menjaga perdamaian di semenanjung Korea selama 60 tahun, meskipun provokasi Korea Utara seperti uji coba rudal nuklir dan rudal, peluncuran rudal, dan peristiwa berbahaya tahun 2010 - tenggelamnya kapal Cheonan dan serangan artileri di pulau Yeonpyeong. Saat ini, Amerika Serikat memiliki sekitar 28.500 tentara yang berbasis di Korea Selatan, yang menurut Ketua Kepala Staf Gabungan Jendral Martin Dempsey, memberikan "jaminan bagi sekutu kita" di wilayah tersebut. Untuk bagiannya, Angkatan Bersenjata Korea Selatan yang berkekuatan 650.000 orang adalah kekuatan militer modern yang cakap. Perlu dicatat bahwa meskipun militer Korea Utara ditempatkan pada "high

alert”, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda mobilisasi skala besar ataupun posisi untuk konflik. (Cook J. , 2013, hal. 562).

Manfaat lain dari aliansi militer seperti yang juga disinggung sebelumnya adalah bahwa mereka memfasilitasi pembagian beban antara anggota. Misalnya, NATO menjalankan Pasal 5 dari Perjanjian Washington setelah serangan teroris pada 9/11 dan kemudian melakukan pasukan militer ke Afghanistan dalam operasi "di luar wilayah" pertamanya. Keterlibatan aliansi memungkinkan pembentukan *International Security Assistance Force Afghanistan (ISAF)* yang akhirnya tumbuh hingga beranggotakan 50 negara. Pada Februari 2013, ada lebih dari 100.000 pasukan ISAF yang bertugas di Afghanistan. Sementara sebagian besar pasukan ini (66.000) adalah pasukan AS, 34.000 sisanya berdiri sebagai bukti komitmen abadi aliansi dan merupakan sumber daya militer tambahan yang tidak harus dilakukan AS untuk melakukan operasi militer di Afghanistan.

Sebuah aliansi menawarkan persepsi yang lebih besar tentang "legitimasi" dalam sistem internasional, terutama bila dibandingkan dengan tindakan sepihak oleh satu negara — tidak peduli seberapa besar atau kuatnya. Ini diilustrasikan dengan membandingkan dua penggunaan kekuatan baru-baru ini oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1991, George H.W. Pemerintahan Bush mampu menciptakan koalisi lebih dari 30 negara yang bekerja dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 678 yang mengesahkan penggunaan kekuatan terhadap Irak. Sebaliknya, keputusan tahun 2003 oleh pemerintahan George W. Bush secara sepihak untuk menyerang Irak setelah gagal menggalang dukungan untuk aksi militer di PBB dan dalam NATO, diyakini telah menyebabkan masalah bagi Amerika Serikat di arena internasional (Cook J. , 2013, hal. 563).

Aliansi juga menawarkan akses geostrategis (yaitu, mendasarkan hak, izin penerbangan, dll.) ke area utama di mana kepentingan nasional dipertaruhkan. Meskipun demikian, bahkan sekutu mempertahankan hak kedaulatan mereka untuk

menolak akses sebagaimana dibuktikan oleh keputusan Turki untuk menolak penggunaan wilayahnya oleh AS selama invasi Irak 2003 (Cook J. , 2013, hal. 563).

Kembali pada *trilateral military alliance*, apabila Korea Selatan tergabung dalam aliansi militer ini, maka akan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Kombinasi manfaat trilateralisme yang “memudahkan” dan aliansi militer yang memberikan kekuatan serta faktor *deterrence*, ditambah dengan faktor adanya kesamaan tujuan antara AS, Korea Selatan dan Jepang dimana ketiganya menginginkan terciptanya perdamaian di wilayah Asia Timur. Namun hal itu terhambat atas adanya ancaman nuklir dari Korea Utara. Kondisi yang terjadi di wilayah ini pun semakin dinamis ketika Korea Utara menyatakan bahwa target bagi ancaman yang mereka buat adalah Korea Selatan dan Jepang itu sendiri. Maka pembentukan aliansi ini menjadi patut untuk dipertimbangkan.